

RESPON AMNESTY INTERNATIONAL TERHADAP PEMBERANTASAN NARKOTIKA DAN OBAT – OBATAN BERBAHAYA (NARKOBA) DI FILIPINA PADA MASA RODRIGO DUTERTE

Veniati Sarlina¹
Nim. 1302045193

Abstract

Early entry of drugs in the Philippines was preceded by the entry of opium-type drugs used by the Moro tribe in Mindanao to provide a heady effect of consciousness that could attack or kill Spanish captains who colonized the Philippines at that time. But an American naval officer has discovered that opium that has spread among the public is not a means of gathering the courage to fight the invaders again but is used as a result of opium addiction. Drug abuse in the Philippines continued until the reign of Rodrigo Duterte, so President Duterte took a firm stance in eradicating drug abuse in the Philippines. Duterte reinstated some of the contents of the 9165 republic act with the maximum penalty of death, so that drug abusers will be shot dead if refused to be detained. According to the concept of human rights, such acts are not justified because of violations contained in the universal declaration of human rights in which allegations of drug abuse are not punishable by the courts of law to be enforced. So that action gets criticized from various international community and one of them is international amnesty. This study shows that the response of international amnesty to the way of drug eradication in the Philippines during the time of Rodrigo Duterte has 4 responses, namely to appeal to the Philippine Senate for investigation, to conduct a direct investigation by an international amnesty, to invite the international community to act in rejection. Through that response, amnesty international wants the policy to be stopped.

Keywords: : *Amnesty International, Eradication of Drugs by Duterte.*

Pendahuluan

Isu Narkotika dan Obat – obatan Berbahaya (Narkoba) telah meresahkan banyak negara di dunia, tak terkecuali negara - negara di kawasan Asia Tenggara. Hal ini dikarenakan Asia Tenggara mempunyai letak yang strategis dan memiliki negara - negara berkembang di dalam kawasan tersebut. Sehingga menjadikannya sebagai kawasan yang rentan dan menjadi jalur perdagangan Narkoba internasional. Untuk jenis opium penggunaannya sudah lama dikenal pada beberapa negara di Asia Tenggara dan salah satunya yaitu Filipina.

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email : veniati_sarlina@yahoo.com

Opium yang termasuk dalam golongan narkotika, mulai ada dan dipergunakan di Filipina pada tahun 1521 dan pada tahun 1631 dipergunakan oleh suku Moro di Mindanao untuk memberikan efek hilangnya kesadaran yang memabukkan sehingga dapat menyerang atau membunuh kapten Spanyol yang menjajah Filipina pada saat itu. Selain memberikan efek untuk menghilangkan kesadaran, pada tahun 1641 opium memasuki Manila dan dipergunakan oleh masyarakat sehingga saat tertangkap dan dipenjara oleh penjajah maka mereka akan menolak memberikan informasi serta tidak merasakan sakit saat disiksa demi informasi yang diperlukan oleh pihak yang melakukan penangkapan tersebut.

Salah seorang petugas angkatan laut Amerika yang bernama Charles Wilkes melakukan ekspedisi di negara - negara Asia pada tahun 1838 - 1842. Saat melakukan ekspedisi di Filipina, Charles mengetahui bahwa opium telah tersebar pada masyarakat Filipina yang digunakan tanpa sepengetahuan orang - orang Spanyol. Hal tersebut dikarenakan banyaknya masyarakat Filipina yang mencoba melawan orang - orang Spanyol melalui penggunaan opium sehingga penggunaan opium bagi masyarakat Filipina dilarang oleh Spanyol. Jika masyarakat Filipina diketahui menggunakan Narkoba, maka akan dikenakan hukuman mati yang diterapkan oleh Spanyol. Akan tetapi Charles pun mengetahui bahwa penggunaan opium disalahgunakan oleh masyarakat Filipina. Penyalahgunaan opium yang dilakukan oleh masyarakat Filipina adalah mengkonsumsi opium secara terus - menerus sebagai akibat dari kandungan zat adiktif yang ada pada opium tanpa melakukan perlawanan lagi kepada orang - orang Spanyol.

Terlepas dari masa penjajahan Spanyol, Amerika dan Jepang, ketergantungan Narkoba di Filipina semakin kuat dengan masuknya berbagai macam jenis obat - obatan berbahaya lainnya seperti ganja, morfin, kokain dan heroin. Hal ini dikarenakan belum adanya undang - undang yang mengatur tentang penggunaan obat - obatan tersebut selain opium, sehingga para masyarakat menggunakannya secara bebas. Penggunaannya pun terdapat 2 cara yaitu menggunakan suntikan dan dengan cara dibakar seperti saat sedang merokok. Penanganan penyalahgunaan Narkoba belum terlihat keseriusannya oleh presiden yang menjabat pasca lepasnya Filipina oleh penjajah, namun tetap adanya peraturan yang mengatur pelarangan penyalahgunaan Narkoba serta penggunaan hukuman mati bagi para penyalahgunaan Narkoba.

Keberadaan Narkoba di Filipina terus-menerus disalahgunakan oleh masyarakat Filipina. Presiden yang menjabat di Filipina pun terus berupaya agar kasus tersebut dapat teratasi. Upaya-upaya yang dilakukan belum sepenuhnya berhasil hingga saat Duterte menjabat sebagai presiden ke-16. Dengan banyaknya jumlah pengguna Narkoba yang ada, maka Duterte melaksanakan janji yang dikatakan saat berkampanye sebelum menjadi presiden yaitu akan memberantas penyalahgunaan Narkoba di Filipina secara tegas.

Cara pemberantasan Narkoba yang dilakukan yaitu dengan memberlakukan kembali 9 pasal *Republic Act* 9145 yang berisikan hukuman penjara seumur hidup sampai hukuman mati serta denda senilai 500.000 peso sampai 10.000.000 peso bagi para penyalahgunaan Narkoba. Jenis Narkoba yang dilarang penggunaannya dan terdapat di dalam *Republic Act* no. 9165 yaitu : opium, morfin, heroin, kokain atau kokain hidroklorida, shabu, ganja, ekstasi, dan obat-obatan yang dirancang atau yang baru diperkenalkan dan turunannya. Duterte juga memerintahkan kepada pihak kepolisian dan warga sipil yang ingin memberantas para penyalahgunaan Narkoba untuk menembak mati para penyalahgunaan Narkoba yang menolak untuk ditahan.

Namun dalam penanganan Narkoba bersama dengan pihak kepolisian serta warga sipil yang terjadi adalah para pelaku tersebut tetap dibunuh meskipun telah menyerahkan dirinya untuk ditangkap serta memohon agar tetap dibiarkan hidup saat polisi mendatangi rumah mereka yang mengatasnamakan satuan anti-Narkoba. Banyak diantaranya korban yang tidak terkait kasus Narkoba sama sekali yang turut menjadi korban. Hal tersebut dikarenakan Setiap 1 orang yang terbunuh polisi tersebut mendapatkan bayaran sebesar \$300 oleh atasannya dan tidak ada insentif bagi penangkapan yang kemudian dibawa pada peradilan yang seharusnya dilakukan. Daftar pengguna Narkoba yang dimiliki oleh pihak kepolisian didapatkan hanya berdasarkan asumsi masyarakat yang belum terbukti kebenarannya.

Namun terdapat juga sebuah kasus dimana warga sipil yang membunuh seseorang dengan motif lain, akan tetapi kematiannya dibuat seolah-olah orang yang dibunuh tersebut merupakan pengguna Narkoba. Hal tersebut dilakukan agar motif pembunuhannya tidak dicurigai oleh pihak kepolisian sebagai suatu kasus pembunuhan diluar operasi pemberantasan Narkoba.

Hal inilah yang kemudian menarik perhatian *Amnesty International*, yang mana sebagai organisasi dunia dalam menegakkan Hak Asasi Manusia *Amnesty International* menilai bahwa pemberantasan Narkoba yang dilakukan oleh presiden Duterte telah melanggar HAM yang terdapat di dalam *Universal Declaration of Human Rights*. Oleh karena itu *Amnesty International* mulai terlibat di Filipina dalam merespon kejadian-kejadian tersebut untuk mengembalikan nilai-nilai HAM yang telah hilang di Filipina.

Sehingga diharapkan Rodrigo Duterte tidak membunuh para pelaku penyalahgunaan Narkoba secara langsung melainkan melalui proses hukum terlebih dahulu yang seharusnya dilakukan serta tidak melibatkan warga sipil untuk mengambil tindakan secara langsung dalam menghukum para pelaku kejahatan maupun membunuh dengan alasan tersendiri yang dikaitkan dengan kejahatan Narkoba.

Kerangka Dasar Teori dan Konsep

Konsep Hak Asasi Manusia

Menurut John Locke, HAM merupakan hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. Oleh karenanya, tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Hak ini sifatnya sangat mendasar (fundamental) bagi hidup dan kehidupan manusia serta merupakan hak

kodrati yang tidak bisa terlepas dari dan dalam kehidupan manusia. *Commission of Human Rights* mempersiapkan sebuah pernyataan internasional tentang HAM yaitu *Universal Declaration of Human Rights*. Di dalam *Universal Declaration of Human Rights* terdapat hak legal (jaminan perlindungan hukum) yang terdiri dari 2 pasal, yaitu:

1. Pasal 11 : (a) Setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan suatu tindak pidana dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya menurut hukum dalam suatu pengadilan yang terbuka, di mana dia memperoleh semua jaminan yang diperlukan untuk pembelaannya. (b) Tidak seorang pun boleh dipersalahkan melakukan tindak pidana karena perbuatan atau kelalaian yang tidak merupakan suatu tindak pidana menurut undang-undang nasional atau internasional, ketika perbuatan tersebut dilakukan. Juga tidak diperkenankan menjatuhkan hukuman yang lebih berat daripada hukum yang seharusnya dikenakan ketika pelanggaran pidana itu dilakukan.

Masyarakat Filipina yang diduga menyalahgunakan Narkoba, tidak dianggap bersalah sampai dibuktikan dalam suatu persidangan yang dilakukan. Saat dilakukannya persidangan, masyarakat Filipina sebagai terduga penyalahgunaan Narkoba memperoleh jaminan atas dirinya yang diperlukan sebagai upaya untuk pembelaan.

2. Pasal 12 : Tidak seorang pun boleh diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya atau hubungan surat menyuratnya dengan sewenang-wenang; juga tidak diperkenankan melakukan pelanggaran atas kehormatan dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran seperti ini.

Masyarakat Filipina yang diduga sebagai menyalahgunaan Narkoba berhak mendapatkan perlindungan hukum sampai ditetapkan sebagai tersangka dalam menyalahgunakan Narkoba.

Metodologi Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Data yang digunakan menggunakan data sekunder. Serta metode pengumpulan data yang digunakan secara komprehensif dalam penelitian ini menggunakan *library research*. Teknik analisis data yang digunakan yaitu dengan cara metode ilustratif yaitu metode yang mengaplikasikan teori pada kondisi faktual. Data yang diperoleh dari studi literatur dan dokumen ini kemudian dianalisis menggunakan teori dan konsep yang saling berkaitan satu sama lain dengan obyek yang akan diteliti.

Hasil Penelitian

Pemberantasan Narkoba di Masa Rodrigo Duterte

Pada awal kepemimpinannya tanggal 30 Juni 2016, Duterte menunjuk Ronald M. Dela Rosa sebagai kepala Kepolisian Nasional Filipina (PNP) serta menjadi penanggung jawab dari *Operation Plan* (Oplan) *Double Barrel*. Oplan *Double Barrel* dikeluarkan oleh kepolisian Filipina yang diresmikan pada tanggal 1 Juli 2016 melalui surat komando no. 17 tahun 2016. Dalam surat komando tersebut disebutkan bahwa operasi ini dilaksanakan atas perintah Duterte untuk menghapus secara tuntas

peredaran Narkoba di Filipina dalam kurun waktu 6 bulan masa kepemimpinan Duterte. Hal tersebut dikarenakan kondisi pengguna Narkoba di Filipina mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2008 jumlah pengguna Narkoba mencapai 1,7 juta orang dan jumlah tersebut menurun menjadi 1,2 juta orang pada tahun 2012.

Menurut *Dangerous Drugs Board* (DDB), jumlah pengguna Narkoba di Filipina pada tahun 2016 mencapai 1,7 juta orang dan 1,8 juta orang berdasarkan data yang diberikan oleh *Philippine Drug Enforcement Agency* (PDEA). Namun Duterte memberikan pernyataan bahwa pengguna Narkoba yang sebenarnya berjumlah 4 juta orang di tahun 2016. Jumlah tersebut diyakini dengan berdasarkan daftar pengguna Narkoba yang dimiliki oleh Duterte.

Pada 30 Juni 2016 Duterte mengeluarkan *House Bill* 01 yang berisikan pemberlakuan kembali 30 pasal yang terdiri dari *Republic Act* 3815, *Republic Act* 7080, *Republic Act* 9165, *Republic Act* 6539, dan *Republic Act* 9346. Untuk kasus kejahatan Narkoba, Duterte mengamandemen sebagian isi *Republic Act* 9165 dengan memberlakukan hukuman penjara seumur hidup sampai hukuman mati bagi para pelaku kejahatan Narkoba yang disetujui oleh *House of Representatives* (HoR) Filipina melalui sebuah proposal yang diajukan oleh Duterte. Terdapat 9 pasal pada *Republic Act* 9165 yang diberlakukan kembali yang berisikan menjual, mendistribusikan, memproduksi Narkoba, dan beberapa pasal lainnya dengan memberikan hukuman penjara seumur hidup sampai hukuman mati beserta denda sebesar 500.000 peso - 10.000.000 peso.

Selain itu Duterte memerintahkan kepada pihak kepolisian agar dapat menembak mati tersangka penyalahgunaan Narkoba jika melakukan perlawanan saat dilakukannya penangkapan. Pemberlakuan tersebut juga diberlakukan kepada warga sipil yang ikut memberantas para penyalahgunaan Narkoba. Penembakan di tempat yang diterapkan merupakan cerminan sikap tegas Duterte dalam memberantas penyalahgunaan Narkoba.

Namun kebijakan tersebut tidak berjalan sebagaimana harusnya kebijakan tersebut diterapkan. Para tersangka penyalahgunaan Narkoba tetap ditembak oleh pihak kepolisian meskipun tidak adanya perlawanan. Sekitar 600.000 pengguna dan pengedar Narkoba telah menyerahkan diri ke kantor polisi dengan harapan tidak ditembak mati saat pihak kepolisian datang untuk melakukan penyergapan.

Terdapat juga beberapa kasus dimana para tersangka penyalahgunaan Narkoba diculik oleh beberapa warga sipil yang mengatasnamakan satuan anti-Narkoba sebelum pada akhirnya ditembak mati. Diantara para korban yang diculik oleh warga sipil tersebut tidak sedikit jumlah korban yang sebenarnya tidak terkait kasus Narkoba sama sekali. Hal ini dikarenakan kebijakan tersebut telah dimanfaatkan beberapa orang untuk kepentingan pribadi. Sehingga korban yang tidak bersalah dikalungkan sebuah tulisan yang bertuliskan "saya pengguna Narkoba" dan diletakkan shabu atau jenis lainnya agar kematiannya tidak dicurigai sebagai pembunuhan diluar operasi pemberantasan Narkoba.

Keterlibatan Amnesty International

Sebagai organisasi dunia dalam menegakkan HAM, *Amnesty International* ikut andil mengenai permasalahan pemberantasan Narkoba di Filipina oleh Duterte. *Amnesty International* menilai bahwa pemberantasan yang dilakukan oleh Duterte telah melanggar nilai - nilai HAM yang terkandung di dalam *Universal Declaration of Human Rights* mengenai hak untuk hidup dan hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.

Cara pemberantasan Narkoba yang dilakukan Duterte dengan menembak mati tersangka penyalahgunaan Narkoba saat melakukan perlawanan, dibenarkan oleh masyarakat Filipina dengan pemberlakuan kembali 9 pasal pada *Republic Act 9165* yang menyatakan bahwa para penyalahgunaan Narkoba mendapatkan hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati. Namun *Amnesty International* tidak membenarkan cara pemberantasan Narkoba tanpa melalui proses peradilan terlebih dahulu.

Amnesty International adalah salah satu organisasi internasional *non-governmental* yang didedikasikan untuk memajukan HAM. *Amnesty International* memiliki misi untuk menyelenggarakan penelitian dan aksi yang memfokuskan dalam pencegahan pelanggaran berat HAM yang berakibat mengganggu integritas mental, kebebasan untuk berekspresi, dan kebebasan dari diskriminasi dalam konteks penegakan HAM yang diabadikan dalam *Universal Declaration of Human Rights* dan standar internasional lainnya. *Amnesty International* secara intensif melakukan penelitian dan kampanye atas kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di seluruh pelosok dunia. Hasil dari penelitian dan kampanye ini kemudian diharapkan dapat mempengaruhi pemerintah dan pihak-pihak lain yang terkait kuat secara politik dalam menetapkan sebuah kebijakan politis untuk masyarakat yang bersangkutan. *Amnesty International* bekerja baik secara global maupun lokal dimanapun dan bagi siapapun untuk perubahan ke dunia yang lebih baik.

Banyaknya korban yang ditimbulkan membuat *Amnesty International* mulai melakukan aksinya untuk menghentikan cara pemberantasan Narkoba yang dilakukan oleh Duterte. *Amnesty International* mulai melakukan aksinya dalam menentang pemberantasan Narkoba yang dilakukan oleh Duterte tepat pada 100 hari kepemimpinan Duterte. Aksi penentangan tersebut tidak hanya dilakukan sekali, namun *Amnesty International* terus-menerus melakukan aksinya sampai Duterte menghentikan cara pemberantasan Narkoba yang dilakukan.

Dasar keterlibatan *Amnesty International* dalam melakukan penentangan tersebut ialah memperjuangkan hak masyarakat Filipina yang telah dilanggar. Hak tersebut ialah hak untuk hidup serta hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Pada 9 pasal yang diberlakukan kembali tidak mengharuskan para penyalahgunaan Narkoba ditembak di tempat. Sehingga meskipun terbukti bersalah dalam kasus penyalahgunaan Narkoba, para tersangka penyalahgunaan Narkoba harus melalui proses peradilan sebelum hukuman diberikan. Dengan melalui proses peradilan yang seharusnya dilakukan, para tersangka penyalahgunaan Narkoba dapat melakukan pembelaan atas dirinya sehingga dapat mengurangi hukuman yang akan diterima

tanpa harus melalui hukuman mati. Keterlibatan *Amnesty International* di Filipina diperkuat dengan adanya perjanjian internasional yang diratifikasi oleh Filipina terkait penentangan adanya hukuman mati. Perjanjian tersebut dibuat oleh *Amnesty International* dan diratifikasi oleh 81 negara. Sehingga berdasarkan perjanjian tersebut, *Amnesty International* pun tidak menyetujui penggunaan hukuman mati di Filipina.

Memberikan Seruan Kepada Senat Filipina

Dalam merespon pemberantasan Narkoba di Filipina, pada tanggal 7 Oktober 2016 *Amnesty International* mulai melakukan aksinya dengan menyerukan kepada senat Filipina agar dapat dilakukannya proses penyelidikan terhadap kasus pembunuhan yang terjadi di luar hukum. Seruan ditujukan kepada senat Filipina dikarenakan senat memiliki wewenang untuk mempertimbangkan agar mengubah kebijakan yang tidak berjalan sesuai dengan seharusnya. Seruan tersebut disampaikan dalam bentuk email kepada 5 senator Filipina yaitu senator Grace Poe, senator Aquilino Pimentel, senator Panfilo Lacson, senator Richard Gordon, dan senator Sonny Angara. *Amnesty International* menuntut agar penyelidikan tersebut harus dilakukan secara independen, imparial dan transparan yang tentunya bebas dari pengaruh pihak kepolisian.

Akan tetapi setelah menerima seruan *Amnesty International*, tetap saja tidak adanya penyelidikan yang dilakukan senat Filipina. Hal ini dikarenakan para senator sangat mendukung kebijakan tersebut yang dinilai berhasil dalam memberantas penyalahgunaan Narkoba. Senator Filipina pun belum menemukan bukti bahwa terdapat pelanggaran HAM dalam implementasi kebijakan tersebut.

Namun tidak semua senator setuju dengan kebijakan yang dibuat oleh Duterte. Salah seorang senator yang bernama Leila De Lima menentang cara pemberantasan Narkoba tersebut dan berkeinginan agar cara pemberantasan Narkoba dihentikan. Akan tetapi Duterte tidak menghentikan kebijakannya dan terus melakukan apa yang dianggap benar. Duterte pun merespon penentangan tersebut dengan menuduh De Lima menerima uang dari para pengedar Narkoba yang berada dalam penjara terbesar di Filipina saat De Lima menjabat sebagai menteri kehakiman.

Para pendukung Duterte pun yang berada di Kongres Filipina ikut menjatuhkan De Lima dengan melakukan penyelidikan atas dirinya. Hasil penyelidikan tersebut akan digunakan untuk menyingkirkan De Lima dari jabatannya jika terbukti bahwa tuduhan Duterte benar. Akan tetapi De Lima tetap menentang hukuman mati yang dilakukan oleh Duterte serta tetap mempertahankan keyakinannya bahwa apa yang dilakukannya adalah benar meskipun anggota senat yang lain tidak mendukungnya. De Lima pun menyerukan kepada intervensi internasional untuk dapat melakukan penyelidikan terhadap pembunuhan para pengguna dan pengedar Narkoba, serta masyarakat Filipina yang terbunuh diluar kasus penyalahgunaan Narkoba.

Dengan tidak adanya penyelidikan yang dilakukan oleh senat Filipina, *Amnesty International* pun mengajak masyarakat internasional untuk dapat mengirimkan sebuah bentuk protes dalam bentuk email kepada seluruh anggota senat Filipina yang telah menyetujui cara pemberantasan Narkoba yang dilakukan oleh Duterte. Kontak

email masing-masing anggota senat Filipina dapat dilihat pada situs resmi senat Filipina.

Amnesty International pun menyediakan sebuah format dalam situs resminya pada bagian kampanye. Sehingga bagi masyarakat internasional yang menyetujui aksi yang dilakukan *Amnesty International* dalam bentuk email kepada senat Filipina, dapat mengisi format yang tersedia yaitu dengan mengisi nama, email, serta negara dari masyarakat internasional yang berpartisipasi. Ketika format tersebut telah diisi dan dikirimkan kepada *Amnesty International*, maka secara otomatis sebuah email akan dikirimkan yang mengkonfirmasi bahwa masyarakat internasional telah berpartisipasi dalam aksi yang dilakukan oleh *Amnesty International* terhadap pemerintahan Filipina. Semakin banyak masyarakat yang bertindak dan memberi dukungan dalam melakukan aksi protes tersebut, maka semakin memberi penekanan pula terhadap pemerintahan Filipina agar cara pemberantasan Narkoba yang dilakukan dapat dihentikan.

Sebagai bentuk dukungan dan bentuk kepedulian masyarakat internasional terhadap korban pemberantasan Narkoba di Filipina, masyarakat internasional pun merespon kejadian yang terjadi di Filipina. Cara yang dilakukan pun adalah dengan mengirim email kepada anggota senat serta pemerintahan Filipina agar dapat menghentikan cara pemberantasan Narkoba yang dilakukan oleh Duterte. Selain itu setelah mengirim bentuk protes kepada pemerintahan Filipina, masyarakat internasional pun mengajak lebih banyak kerabat lainnya agar dapat memberikan bentuk protes terhadap pemerintahan Filipina sehingga semakin banyak memberikan penekanan kepada pemerintahan Filipina. Kritik dalam bentuk protes pun tidak hanya datang dari masyarakat internasional secara individu saja, akan tetapi organisasi-organisasi dunia yang berkaitan dengan HAM pun ikut mengancam serta bertindak atas pemberantasan Narkoba yang dilakukan oleh Duterte.

Para aktivis *Amnesty International* yang berada di Thailand pun melakukan aksi penentangan terhadap cara pemberantasan Narkoba di Filipina. Aksi penentangan tersebut dilakukan dengan cara berdemonstrasi yang dilakukan pada bulan April 2017 di depan kantor kedutaan besar Filipina yang berada di Bangkok, Thailand. Para aktivis *Amnesty International* mendesak pemerintahan Filipina termasuk para senat Filipina agar segera menghentikan cara pemberantasan Narkoba yang dilakukan oleh Duterte. Sehingga melalui demonstrasi tersebut, dapat semakin memberi penekanan kepada senat Filipina untuk segera bertindak dalam melakukan penyelidikan yang menjadi seruan *Amnesty International* sebelumnya.

Bentuk protes atas cara pemberantasan Narkoba yang dilakukan oleh Duterte tidak hanya berasal dari dunia internasional saja, akan tetapi aksi protes datang dari masyarakat Filipina yang dalam hal ini merupakan pemuka agama serta para keluarga yang turut menjadi korban. Berbagai demonstrasi pun dilakukan oleh para pemuka agama serta keluarga korban. Mereka menuntut agar cara pemberantasan Narkoba segera dihentikan. Para demonstran pun menyatakan ketidaksetujuan cara tersebut salah satunya dikarenakan jumlah korban yang ditimbulkan sebagian besar berasal dari keluarga miskin. Dukungan penuh yang sebelumnya diberikan oleh masyarakat

Filipina terhadap Duterte pun berubah menjadi sebuah kecaman ketika seorang anak terbunuh oleh petugas kepolisian.

Melakukan Penyelidikan di Filipina

Aksi lainnya yang dilakukan oleh *Amnesty International* yaitu dengan melakukan penyelidikan secara langsung terhadap kasus pembunuhan akibat perang melawan narkoba yang terjadi di Filipina. Penyelidikan yang dilakukan *Amnesty International* adalah dengan cara mencari keterangan dari 110 warga Filipina yang berasal dari para saksi yang melihat secara langsung saat eksekusi dilakukan, kerabat korban, pengguna Narkoba yang masih hidup, petugas kepolisian, anggota pemerintahan, masyarakat sipil, serta kelompok agama. Dalam beberapa kasus yang didokumentasikan oleh *Amnesty International*, para saksi menggambarkan para terduga pengguna Narkoba berteriak dan mengatakan bahwa mereka menyerahkan dirinya untuk ditangkap. Mereka melakukannya sambil berlutut serta memohon sambil menangis untuk tetap dibiarkan hidup. Namun permohonan tersebut hanyalah sia-sia dikarenakan para terduga pengguna Narkoba tersebut tetap ditembak mati.

Amnesty International juga menyatakan bahwa pihak kepolisian yang melakukan operasi tersebut menaruh bukti dan membuat laporan palsu untuk menutupi kesalahan mereka. Pihak kepolisian meletakkan sebuah senjata di dekat tubuh korban, sehingga korban tersebut dianggap melakukan perlawanan saat akan ditangkap. Hal tersebut dilakukan karena adanya insentif keuangan bagi kasus pembunuhan tersebut. Salah seorang petugas kepolisian mengakui bahwa setiap operasi yang dilakukan, polisi yang bertugas akan menerima bayaran atas pembunuhan yang dilakukan.

Amnesty International pun mengetahui cara yang dilakukan oleh warga sipil yang turut serta dalam memberantas para pelaku penyalahgunaan Narkoba. Warga sipil datang secara berkelompok saat mendatangi seseorang yang diduga pengguna maupun pengedar Narkoba. Dari beberapa kelompok yang ada, beberapa diantaranya langsung membunuh para tersangka Narkoba setelah dibawa ke dalam sebuah gang yang tidak jauh dari rumah korban. Namun ada juga beberapa kelompok yang menggunakan cara menculik terlebih dahulu sebelum pada akhirnya tersangka penyalahgunaan Narkoba tersebut ditemukan dalam keadaan meninggal dengan wajah terbungkus pita perekat dan barang bukti berupa shabu didalam pakaian korban.

Selain menemukan cara pembunuhan tersangka penyalahgunaan Narkoba, *Amnesty International* pun menemukan bahwa mayoritas korban yang dibunuh adalah berasal dari kalangan keluarga miskin yang ada di dalam daftar pengguna dan pengedar Narkoba. Daftar tersebut dibuat oleh pemerintah yang mana nama-nama dalam daftar tersebut didapatkan hanya berdasarkan asumsi masyarakat sekitar. Sehingga nama-nama yang ada di dalam daftar tersebut belum terbukti jika memang mereka adalah pengguna maupun pengedar Narkoba. Daftar pengguna dan pengedar Narkoba yang telah dibuat oleh pemerintah kemudian diserahkan kepada pihak kepolisian agar nama-nama yang ada di dalam daftar tersebut bisa segera ditangkap.

Hasil penyelidikan yang dilakukan oleh *Amnesty International* disusun menjadi sebuah laporan. Laporan tersebut diunggah di situs resmi *Amnesty International* agar masyarakat internasional dapat mengetahui kasus pemberantasan Narkoba yang sedang terjadi di Filipina. *Amnesty International* mengharapkan dengan adanya laporan tersebut dapat semakin memberikan banyak penekanan dari masyarakat internasional kepada pemerintah Filipina untuk segera menghentikan cara pemberantasan Narkoba yang dilakukan.

Meminta Bantuan Kepada International Criminal Court

Setelah berbagai respon yang telah dilakukan *Amnesty International* dan tidak membawa perubahan, akhirnya *Amnesty International* kembali bertindak dengan menyerukan keinginan mereka kepada *International Criminal Court* (ICC). Seruan tersebut didasari oleh semakin meningkatnya jumlah korban yang disertai dengan bukti-bukti yang ada terutama pada anak-anak yang turut menjadi korban dalam perang melawan Narkoba. Sejak Juni 2016 hingga Desember 2017, total anak-anak yang terbunuh telah mencapai 60 anak. Ke-60 anak tersebut merupakan anak-anak berusia remaja yang berumur antara 13-17 tahun. Namun terdapat juga seorang anak yang dibunuh oleh orang tidak dikenal yang berusia masih sangat muda yaitu berumur 5 tahun. Anak-anak yang terbunuh menjadi target perang melawan Narkoba dikarenakan anak-anak tersebut digunakan oleh para pengguna Narkoba sebagai kurir maupun penjual Narkoba. Hal tersebut dikarenakan belum adanya undang-undang yang mengatur mengenai anak-anak yang menyalahgunakan Narkoba.

Tim peneliti *Amnesty International* pun menyaksikan bagaimana sejumlah besar anak-anak yang dicurigai melakukan pelanggaran terkait Narkoba, di tahan di tempat penampungan yang sangat padat di Manila. Beberapa orang mengatakan bahwa anak-anak tersebut telah disiksa oleh polisi atas penangkapan mereka dan mengklaim bahwa polisi telah memaksa mereka untuk mengambil foto saat memegang Narkoba.

Pada akhirnya Januari 2017 dan Desember 2017, *Amnesty International* menyerukan kepada ICC untuk melakukan penyelidikan terhadap kasus pemberantasan Narkoba yang terjadi di Filipina. Sehingga dengan adanya penyelidikan yang dilakukan oleh ICC dapat membawa perubahan terhadap pemberantasan Narkoba di Filipina. *Amnesty International* pun memberikan laporan yang merupakan hasil penyelidikan sebelumnya di Filipina sebagai bentuk pertimbangan agar ICC dapat menyetujui permintaan *Amnesty International*.

Setelah seruan tersebut pada tanggal 8 Februari 2018, ICC mengumumkan bahwa akan mulai melakukan investigasi pendahuluan di Filipina. Investigasi pendahuluan pada situasi di Filipina akan menganalisis kejahatan yang diduga dilakukan oleh Filipina dalam konteks perang melawan Narkoba yang dikeluarkan oleh pemerintah Filipina.

Jaksa penuntut pada ICC menekankan bahwa pemeriksaan pendahuluan bukanlah penyelidikan, melainkan sebuah proses untuk memeriksa informasi yang tersedia untuk mendapatkan alasan yang kuat sehingga dapat melanjutkan ke tingkat penyelidikan langsung sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Statuta Roma.

Secara khusus berdasarkan pasal 53 ayat 1 Statuta Roma yang menyatakan bahwa sebagai jaksa penuntut, harus mempertimbangkan masalah yurisdiksi, diterimanya oleh negara bersangkutan, dan kepentingan keadilan dalam membuat keputusan ini.

Dalam pelaksanaan mandatnya yang independen dan tidak memihak, tim kerja jaksa penuntut hukum pun akan memberikan pertimbangan atas semua pengajuan dan pandangan yang disampaikan selama setiap proses pemeriksaan pendahuluan berlangsung. Yang mana proses pemeriksaan pendahuluan tersebut dilakukan secara ketat dan selektif dipandu oleh persyaratan Statuta Roma. Tidak ada batasan waktu yang berlaku berdasarkan pemeriksaan pendahuluan. Berakhir ataupun tidaknya kasus tersebut tergantung pada fakta yang ada dan keadaan pada situasi tersebut. Jaksa penuntut hukum akan memutuskan apakah akan berlanjut dengan melakukan penyelidikan yang mana didasari oleh pertimbangan tinjauan peradilan yang sesuai. Tim kerja jaksa penuntut hukum pun akan terus mengumpulkan informasi untuk menetapkan dasar faktual dan hukum yang memadai untuk menentukan atau bahkan menolak untuk melakukan penyelidikan jika tidak ada dasar yang masuk akal untuk melanjutkan kasus tersebut.

Investigasi pendahuluan ICC dalam perang melawan Narkoba di Filipina membawa sedikit harapan kepada masyarakat di Filipina. Meskipun hanya berawal dari investigasi pendahuluan, namun bagi *Amnesty International* hal ini merupakan suatu kemajuan dari apa yang selama ini diperjuangkan. Serta menandai momen penting untuk keadilan dan pertanggungjawaban di Filipina. *Amnesty International* berharap dengan hasil investigasi pendahuluan tersebut dapat membuka jalur terhadap Duterte agar diadili pada mahkamah internasional, sehingga semakin besar peluang untuk menghentikan cara pemberantasan Narkoba di Filipina.

Kesimpulan

Respon *Amnesty International* terhadap pemberantasan Narkoba di Filipina pada masa Duterte merupakan sebuah bentuk kepedulian terhadap hilangnya nilai-nilai HAM di Filipina. Dasar keterlibatan *Amnesty International* pada kasus di suatu negara yaitu jika adanya pelanggaran yang dilanggar pada pasal yang terkandung di dalam *Universal Declaration of Human Rights*.

Hal inilah yang terjadi di Filipina yang mana pemberantasan Narkoba yang dilakukan oleh Duterte tidak melalui peradilan yang seharusnya dilakukan dan menyebabkan banyaknya korban terbunuh termasuk warga sipil yang tidak terkait kasus Narkoba sama sekali. Meskipun hukuman maksimal yang diterima adalah hukuman mati, namun 9 pasal dalam *Republic Act 9165* yang diberlakukan kembali tidak mengharuskan untuk melakukan penembakan di tempat. Sehingga hal inilah yang dipandang *Amnesty International* sebagai suatu pelanggaran HAM dengan menghilangkan hak untuk hidup serta hak jaminan perlindungan hukum bagi masyarakat Filipina yang telah menjadi korban. Hak-hak tersebutlah yang ingin dikembalikan oleh *Amnesty International* di Filipina melalui respon-respon yang dilakukan oleh *Amnesty International* terhadap pemerintahan Filipina. Respon-respon yang diberikan oleh *Amnesty International* yaitu menyerukan dalam bentuk email kepada senat Filipina agar senat Filipina melakukan penyelidikan di Filipina, adanya

penyelidikan langsung yang dilakukan *Amnesty International*, dan meminta bantuan kepada ICC untuk bertindak dalam kasus pemberantasan Narkoba di Filipina.

Akan tetapi respon yang telah dilakukan oleh *Amnesty International* tidak mengubah kebijakan Duterte dalam memberantas Narkoba. Hal tersebut dikarenakan Duterte meyakini bahwa cara tersebut yang paling efektif untuk mengatasi permasalahan Narkoba, meskipun harus mengesampingkan nilai-nilai HAM seperti yang ditudingkan *Amnesty International*.

Daftar Pustaka

Buku

Budiarjo, Miriam. 2006. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Effendi, Masyhur. 1994. *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Marbun, B.N. 2005. *Kamus Politik*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Mauna, Boer. 2000. *Hukum Internasional: Pengertian Peran dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. Bandung: Alumni.

Suherman, Ade Maman. 2003. *Organisasi Internasional dan Integrasi Ekonomi Regional Dalam Perspektif Hukum dan Globalisasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Internet

Amnesty International. 22 Februari 2018. End the attack on human rights in the Philippines. Tersedia di <https://www.amnesty.org/en/get-involved/take-action/duterte-one-year-end-attack-on-human-rights-in-philippines/>.

Amnesty International. 26 November 2017. International Board. Tersedia di <https://www.amnesty.org/en/about-us/international-board/>.

Amnesty International. 14 Agustus 2017. Laporan tahunan Amnesty International. Tersedia di <https://translate.google.com/translate?hl=id&sl=en&u=https://www.amnesty.org/&prev=search>.

Amnesty International. 10 Februari 2018. Philippines: Duterte's 100 days of carnage. Tersedia di <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/10/philippines-dutertes-hundred-days-of-carnage/>.

Amnesty International. 1 Juni 2017. Philippines: Duterte must end his "war on drugs". Tersedia di <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/02/philippines-duterte-must-end-war-on-drugs/>.

- Amnesty International. 14 Februari 2018. The Philippines: ICC examination into drug killings a crucial moment for justice. Tersedia di <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/02/the-philippines-icc-examination-into-drug-killings-a-crucial-moment-for-justice/>.
- Amnesty International. 14 Februari 2018. Philippines: ICC must examine 'war on drugs' crimes as child killings go unpunished. Tersedia di <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/12/philippines-icc-must-examine-war-on-drugs-crimes/>.
- Amnesty International. 26 November 2017. Secretary General and Senior Leadership Team. Tersedia di <https://www.amnesty.org/en/about-us/secretary-general-and-senior-leadership-team/>.
- Amnesty International. 26 November 2017. Statute of Amnesty International. Tersedia di <https://www.amnesty.org/download/Documents/80000/pol200012006en.pdf>.
- Amnesty International. 22 Februari 2018. Stop the return of the death penalty in the Philippines. di <https://www.amnesty.org/en/get-involved/take-action/stop-reintroduction-of-death-penalty-philippines/>.
- Amnesty International. 26 November 2017. Who we are. Tersedia di <https://www.amnesty.org/en/who-we-are/>.
- Asia Times. 22 Februari 2018. Killing complaint casts a pall over Duterte's summit. Tersedia di <http://www.atimes.com/article/killing-complaint-casts-pall-dutertes-summit/>.
- BBC Indonesia. 1 Juni 2017. Amnesty: Polisi Filipina 'rencanakan' pembunuhan dalam perang narkoba. Tersedia di <http://www.bbc.com/indonesia/dunia-38824196>.
- BBC Indonesia. 12 Februari 2018. Leila de Lima, perempuan penantang Presiden Filipina Rodrigo Duterte. Tersedia di <http://www.bbc.com/indonesia/majalah-38457663>.
- BBC Indonesia. 1 Juni 2017. Perang NARKOBA di Filipina: Perempuan yang membunuh para pengedar. Tersedia di http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/08/160826_majalah_filipina_narkoba.
- CNN Philippines. 24 Januari 2018. Duterte's drug list: What we know so far. Tersedia di <http://cnnphilippines.com/news/2016/08/19/President-Duterte-list-of-drug-personalities-politicians.html>.

CNN Philippines. 14 Agustus 2017. Government forum clarifies numbers in Duterte's war on drugs. Tersedia di <http://cnnphilippines.com/news/2017/05/03/statistics-Duterte-war-on-drugs.html>.

CNN. 22 Februari 2018. Philippines: 5-year-old girl killed in drug war, Human Rights Watch says. Tersedia di <https://edition.cnn.com/2016/08/26/asia/danica-may-garcia-philippines-drugs/index.html>.

CNN Philippines. 9 Januari 2018. PNP to resume anti-drug operations. Tersedia di <http://cnnphilippines.com/news/2017/12/06/PNP-resume-tokhang-double-barrel.html>.

Dangerous Drugs Board. 28 Januari 2018. History of DDB. Tersedia di <https://www.ddb.gov.ph/about-ddb/history>.

Encyclopaedia Britannica. 11 Desember 2017. The Spanish Period. Tersedia di <https://www.britannica.com/place/Philippines/The-Spanish-period>.

European Parliament. 2 Januari 2018. Death Penalty: Ratification Of International Treaties. Tersedia di http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/droi/dv/904_deathpenalty_/904_deathpenalty_en.pdf.

GMA News Online. 26 Maret 2018. Man uses child as drug courier. Tersedia di <http://www.gmanetwork.com/news/news/regions/88816/man-uses-child-as-drug-courier/story/>.

House Bill 01. 12 Mei 2017. Naskah Kebijakan Hukuman Mati. Tersedia di www.congress.gov.ph/legisdocs/basic_17/HB00001.pdf.

Inquirer Net. 28 Januari 2018. In the know : Death Penalty. Tersedia di <http://newsinfo.inquirer.net/785954/in-the-know-death-penalty>.

International Criminal Court. 14 Februari 2018. Statement of the Prosecutor of the International Criminal Court, Mrs Fatou Bensouda, on opening Preliminary Examinations into the situations in the Philippines and in Venezuel. Tersedia di <https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=180208-otp-stat>.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. 21 September 2017. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Tersedia di [https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--\\$R48R63.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--$R48R63.pdf).

Philippine Sociological Review. 11 September 2017. Sejarah singkat ketergantungan NARKOBA di Filipina. Tersedia di <http://116.50.242.171/PSSC/index.php/psr01/article/view/610/601>.

- Philstar Global. 20 Juli 2017. Are there 4 million drug addicts in the Philippines ?. Tersedia di <http://www.philstar.com/news-feature/2016/12/16/1654043/are-there-4-million-drug-addicts-philippines>.
- Philstar Global. 27 Januari 2018. Death penalty: Abolition, reinstatement, abolition. Tersedia di <https://www.philstar.com/opinion/2008/07/02/70640/death-penalty-abolition-reinstatement-abolition>.
- Pinoy Top Tens. 12 September 2017. Check for Prohibited Drug Abuse, here's the Most Common in the Philippines. Tersedia di <http://www.topten.ph/2014/10/05/top-10-popular-prohibited-drugs-philippines/>.
- Rappler. 22 Januari 2018. Is Duterte's '4 million drug addicts' a 'real number'?. Tersedia di <https://www.rappler.com/rappler-blogs/169009-duterte-drug-addicts-real-number>.
- Rappler. 26 Maret 2018. The circumstances surrounding the numerous drug-related deaths in the Philippines are almost always the same across all incidents. Tersedia di <https://www.rappler.com/newsbreak/iq/169726-extrajudicial-killings-philippines-drug-war-patterns>.
- Repository UMY. 16 Maret 2018. Perkembangan Narkoba di kawasan Asia Tenggara. Tersedia di <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/11282/6.%20BAB%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y>.
- Reuters. 22 Februari 2018. Duterte targets Philippine children in bid to widen drug war. Tersedia di <https://www.reuters.com/article/us-philippines-drugs-children-insight/duterte-targets-philippine-children-in-bid-to-widen-drug-war-idUSKBN15T1NB>.
- Senate of The Philippines. 22 Februari 2018. Contact Information of Senate Philippines. Tersedia di <https://www.senate.gov.ph/contact17thcongress.asp>.
- The Guardian. 22 Maret 2018. Aksi pemberantasan Narkoba oleh warga sipil. Tersedia di <https://www.theguardian.com/world/2017/apr/02/philippines-president-duterte-drugs-war-death-squads>.
- The Lawphil Project. 28 Januari 2018. 1987 Constitution Of The Republic Of The Philippines. Tersedia di <http://www.lawphil.net/consti/cons1987.html>.
- The Lawphil Project. 22 Januari 2018. Republic Act 7659. Tersedia di http://www.lawphil.net/statutes/repacts/ra-7659_1993.html.

The Manila Times. 28 Januari 2018. Duterte now stronger than Marcos. Tersedia di <http://www.manilatimes.net/du30-now-stronger-than-marcos/283508/>.

The Manila Times. 22 Februari 2018. Funeral turns into protest vs killings. Tersedia di <http://www.manilatimes.net/funeral-turns-protest-vs-killings/347011/>.

The New York Times. 24 Januari 2018. Philippines Moves Closer to Reinstating Death Penalty. Tersedia di <https://www.nytimes.com/2017/03/01/world/asia/philippines-death-penalty.html>.

Tribun KalTim. 24 Januari 2018. Duterte Umumkan 150 Nama Pejabat yang Terlibat Narkoba di Filipina. Tersedia di <http://kaltim.tribunnews.com/2016/08/08/duterte-umumkan-150-nama-pejabat-yang-terlibat-narkoba-di-filipina>.

Uoregon Edu. 3 Juni 2017. What is Amnesty International ?. Tersedia di http://pages.uoregon.edu/amnesty/amnesty_what.html.

VOA. 12 Februari 2018. Philippine War on Drugs Triggers Widespread Criticism, Senate Investigation. Tersedia di <https://www.voanews.com/a/philippine-war-on-drugs-triggers-criticism-senate-investigation/3476057.html>.